

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia saat ini memang tengah gencar dilakukan, baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Tujuan pembangunan tidak lain adalah membuat masyarakat menjadi berdaya khususnya masyarakat pedesaan yang jarang sekali tersentuh pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Mardikanto dan Poerwoko, 2013 : 61).

Pembangunan yang merata memang menjadi syarat penting untuk melihat suatu negara atau daerah dapat dikatakan maju dan berkembang. Pembangunan yang dilakukan tentu saja harus melihat bagaimana karakteristik-karakteristik maupun potensi yang terdapat pada daerah yang ingin dibangun tersebut, terutama daerah pedesaan yang tentunya jauh berbeda dengan daerah perkotaan yang notabene sudah familiar dengan yang namanya pembangunan. Sehingga sangat penting untuk melihat apakah pembangunan yang ada di desa sudah maju atau bahkan masih tertinggal.

Pedesaan atau desa menurut PP 72 Tahun 2005 adalah sebagai suatu “kesatuan masyarakat hukum” yang memiliki “batas-batas wilayah” yang berwenang untuk “mengatur” dan “mengurus” kepentingan masyarakat, berdasarkan “asal usul dan adat istiadat setempat” yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya, mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub (Nurcholis : 2011). Suatu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun, RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga). Desa biasanya dikepalai oleh pimpinan tertinggi dalam suatu desa sekaligus orang yang mempunyai wewenang penuh terhadap desa yang dipimpinannya, yaitu kepala desa.

Kemajuan suatu desa merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan daerah serta sebagai cara pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan pedesaan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, karena meskipun telah dicapai banyak kemajuan, masyarakat di pedesaan pada umumnya masih banyak tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan (Haryanto : 2007). Dengan majunya sebuah desa, maka otomatis akan membuat masyarakatnya berkembang sesuai dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh pihak desa, sehingga kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera dalam berbagai sektor.

Bangka Barat terdiri dari beberapa kecamatan dan juga desa. Banyak program yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang salah satunya adalah program Desa Mandiri. Desa Mandiri merupakan salah satu program unggulan Pemkab Bangka Barat dan satu-satunya yang ada di Provinsi Bangka Belitung yang ditetapkan pada tahun 2011. Desa Mandiri adalah desa yang aparatur dan masyarakatnya mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, mampu memenuhi segala kebutuhannya dan mampu membangun desanya dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di desa seperti Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Kelembagaan, yang dilaksanakan dengan cara bersama-sama untuk mencapai tujuan.

Dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri terdapat 2 indikator khusus yang harus ada dalam menetapkan suatu desa layak untuk mendapatkan predikat desa mandiri, diantaranya yaitu : *Pertama*, indikator umum antara lain meliputi : Sehat Badanya, Cerdas Otaknya, Tenang Jiwanya, Dan Tebal Kantongnya. *Kedua*, indikator khusus yang meliputi : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Tingkat Pendapatan Penduduk Meningkat, Angka Kemiskinan Menurun, Jumlah Anak Putus Sekolah Menurun, Rata-Rata Pendidikan Masyarakat Meningkat Dan Jumlah Buta Huruf Menurun (Juknis Pelaksanaan Desa Mandiri 2012).

Bangka Barat saat ini terdapat 64 desa dan 4 kelurahan yang terdapat di 6 kecamatan meliputi Kecamatan Muntok, Simpang Teritip,

Tempilang, Kelapa, Jebus dan Parittiga dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 180 ribu jiwa. Dalam program Desa Mandiri sendiri pada tahun 2012 terdapat 12 desa yang mendapat predikat sebagai desa mandiri ini dapat diukur dari berbagai sektor yang ada di desa-desa tersebut.

Diantara 12 desa yang mendapat predikat sebagai desa mandiri, salah satunya adalah Desa Sinar Sari yang terletak di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan potensi perkebunannya. Desa Sinar Sari bisa dikatakan desa yang berada dipedalaman, karena disekitar desa tersebut masih banyak hutan sehingga *notabene* mata pencaharian masyarakatnya adalah petani dan berkebun. Terwujudnya Desa Sinar Sari sebagai salah satu Desa Mandiri tidak terlepas dari peran lembaga desa maupun masyarakat. Predikat Desa Mandiri yang disandang oleh Sinar Sari dilihat dari sektor perkebunan yang potensial menjadi mata pencaharian warga Desa Sinar Sari. Dimana dengan hasil perkebunan yang cukup baik mampu membuat perekonomian warga menjadi lebih baik dan kehidupan masyarakat pun menjadi sejahtera.

Predikat Desa Mandiri tidak terlepas dari peran masyarakat dan sinergisitas lembaga desa dengan bekerjasama untuk mewujudkan desa mereka sebagai salah satu desa mandiri, sehingga menang dalam beberapa sektor misalnya dalam sektor kebersihan dan kesehatan, dimana Desa Sinar Sari telah mampu merealisasikan program sanitasi total berbasis masyarakat, yang merupakan kelanjutan dari program tersedianya jamban

sehat bagi seluruh rumah warga dan terlepas dari buang air besar di sembarang tempat.

Desa Sinar Sari juga menjadi pelopor bagi desa-desa lainnya khususnya yang ada di Kecamatan Kelapa untuk mencontoh program arisan jamban yang diterapkan warga sinar sari untuk membangun jamban sehat di setiap bubung rumah. Atas keberhasilan program kesehatan tersebut, Desa Sinar Sari dapat menjuarai lomba perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014 dan berhak maju ke tingkat Nasional.

Program Desa Mandiri tidak hanya melihat dari sektor pertanian dan perkebunan juga, namun banyak sektor tergantung bagaimana potensi masyarakat yang ada di dalam suatu desa. Salah satu desa yang berada di wilayah pesisir yang mendapat predikat Desa Mandiri adalah Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang.

Desa Tanjung Niur yang berada di wilayah pesisir karakteristik mata pencaharian masyarakat lebih banyak mengandalkan hasil laut, misalnya menangkap ikan, udang dan kepiting yang waktunya tidak menentu, entah itu pada siang hari bahkan juga malam hari. Desa Tanjung Niur memang dikenal dengan hasil lautnya yang melimpah, masyarakatnya pun kebanyakan bermatapencaharian sebagai nelayan dan melaut (Profil Desa Tanjung Niur 2014). Hasil laut seperti ikan, udang, rajungan dan lainnya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Desa Tanjung Niur sendiri, namun biasa memenuhi kebutuhan

masyarakat yang berada di Kecamatan Tempilang, karena hasil laut tersebut sering di distribusikan melalui tengkulak kemudian dijual lagi oleh masyarakat yang berjualan ikan keliling.

Hasil tangkapan nelayan Desa Tanjung Niur seperti ikan, udang dan cumi tidak hanya di jual langsung, namun oleh ibu-ibu Desa Tanjung Niur biasanya juga diolah menjadi berbagai macam olahan makanan lainnya, seperti : belacan (terasi), rusip, *kecalok*, ikan asin dan juga kemplang, yang cukup dikenal masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Tempilang. Dari hasil laut yang potensial yaitu ikan, udang, cumi, kepiting dan lainnya, Desa Tanjung Niur ditetapkan sebagai salah satu Desa Mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Persoalan yang sering kali muncul dalam pelaksanaan seperti Program Desa Mandiri yaitu adanya kegagalan yang mungkin dialami oleh beberapa desa yang menjadi desa mandiri. Kegagalan atau keberhasilan dalam menjalankan program tergantung bagaimana *stakeholder-stakeholder* terkait mampu atau tidaknya menghadapi hambatan-hambatan selama program desa mandiri berjalan.

Perbedaan karakteristik antara Desa Sinar Sari dan Tanjung Niur merupakan salah satu hal yang menarik untuk diteliti mengingat kedua desa ditetapkan sebagai desa mandiri dari potensi yang berbeda, jika Desa Sinar Sari dengan potensi perkebunannya, maka Desa Tanjung Niur dengan potensi kelautannya. Melihat perbedaan karakteristik tersebut menjadi hal yang menarik untuk dilakukan Studi Komparasi mengenai

sinergisitas dan peran lembaga desa dengan adanya program desa mandiri yang berada di Desa Sinar Sari Kecamatan Kelapa dan Tanjung Niur Kecamatan Tempilang. Kajian ini menjadi menarik dilakukan karena konteks karakteristik dan potensi masing-masing desa tersebut sangat beragam, terlebih kedua desa tersebut sama-sama berada pada wilayah administratif Kabupaten Bangka Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang yang telah diungkapkan maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbandingan sinergisitas dan peran lembaga desa dengan masyarakat Desa Sinar Sari dan Tanjung Niur pada desa mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sinergisitas dan peran lembaga pemerintahan dengan masyarakat yang ada di kedua desa yaitu Desa Sinar Sari dan Desa Tanjung Niur.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sinergisitas dan peran dalam pelaksanaan program desa mandiri di Desa Sinar Sari dan Desa Tanjung Niur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam hal pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di desa. Khususnya di wilayah Bangka Belitung dan menjadi landasan dalam mengkaji masyarakat pedesaan dalam upaya pembangunan serta memperkaya literatur tentang penelitian peran lembaga di desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam upaya mengembangkan potensi diri dan sumber daya alam yang dimiliki setiap desa menjadi lebih baik dan sebagai wahana integrasi masyarakat, baik antar warga masyarakat yang ada di desa manapun dengan lembaga pemerintahan untuk saling bekerjasama demi perubahan yang terus membaik dan bersinergi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang bagaimana lembaga pemerintahan desa dalam mewujudkan suatu desa menjadi desa yang mampu berdiri sendiri dan mendapatkan predikat sebagai salah satu desa yang unggul dari desa-desa lainnya. Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini akan peneliti cantumkan tiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, yang dianggap mempunyai

beberapa persamaan dengan penelitian ini. Persamaan tersebut adalah dalam membahas peran tau sinergisitas lembaga pemerintahan desa dalam melakukan pembedayaan dan pembangunan desanya baik itu dalam hal, ekonomi, sosial, dan hidup sehat. Selain terdapat kesamaan, tentunya ada perbedaan titik fokus yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu :

Penelitian *Pertama* adalah yang dilakukan oleh Riantika Hargita Shandi pada tahun 2015 yang berjudul “*Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop)*”, dimana dalam penelitiannya ada beberapa point yaitu : 1) Proses perencanaan LPMD untuk pembangunan di Desa Karangwuni belum dilaksanakan secara optimal. 2) Partisipasi LPMD dalam perencanaan pembangunan di Desa Karangwuni masih rendah, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Fokus perencanaan, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
- b. Partisipatoris, dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh waktu dan tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk dilanjutkan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

- c. Sinergisitas perencanaan yaitu proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh LPMD didesa karangwuni selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi serta interaksi diantara stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari usulan desa dan SKPD bisa dikomunikasikan bersama-sama walaupun adakalanya tidak sinkron.
- d. Legalitas perencanaan LPMD yang mempengaruhi perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama melihat bagaimana partisipasi lembaga masyarakat atau lembaga pemerintahan desa dalam melaksanakan program yang telah di buat oleh pemerintah kabupaten, kemudian menjalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agar program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan program tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Riantika Hargita Shandi ini, memperlihatkan bahwa proses dan partisipasi Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop masih belum dilaksanakan dan masih rendah. Berbeda dengan Penelitian Sinergisitas dan peran lembaga desa dalam mensukseskan program desa mandiri di Desa Sinar Sari dan Desa Tanjung Niur yang lebih melihat peran aktif dan tindakan yang nyata lembaga desa dalam mewujudkan desa Sinar Sari dan Tanjung Niur sebagai salah satu Desa Mandiri.

Penelitian yang *kedua* yaitu yang dilakukan oleh Oktari Wulandari pada tahun 2016 yang berjudul “*Program Desa Mandiri dan Implikasinya terhadap Perubahan Sosial Masyarakat (Studi pada Masyarakat Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat)*” dimana dalam penelitian ini Program Desa Mandiri ini dinilai cukup strategis sebagai upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat di lokasi desa yang memiliki potensi-potensi untuk dikembangkan guna memotivasi dalam berusaha menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru pasca timah.

Dari hasil penelitian tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat setelah Desa Ketap ditetapkan sebagai Desa Mandiri dapat diambil kesimpulan bahwa :

Pertama, Perubahan sosial masyarakat Desa Ketap setelah pelaksanaan program Desa Mandiri meliputi perubahan-perubahan identitas desa terhadap perubahan nama Desa Ketap ditetapkan sebagai Desa Mandiri sehingga nama desa lebih dikenal, perubahan pola pikir dan perubahan kerja sama atau gotong-royong masyarakat terlihat dari kegiatan rutin mereka setiap hari jumat melakukan kerja bakti atau bersih-bersih di kantor desa.

Kedua, perubahan ekonomi masyarakat setelah pelaksanaan program Desa Mandiri yaitu terbukannya lapangan pekerjaan baru. Perubahan lain pada masyarakat terlihat dari cara mereka yang lebih berhati-hati atau lebih memilih untuk menghemat pengeluaran akibat dari

turunnya pendapatan. *Ketiga*, perubahan lingkungan desa setelah pelaksanaan program Desa Mandiri yaitu perubahan pembangunan desa seperti yang terlihat adanya gedung sekolah PAUD yang baru, perubahan kondisi jalan yang kini sudah diaspal, perubahan pada kondisi jembatan dusun tayu, dan adanya pemasangan PLN gratis bagi masyarakat sebanyak sembilan belas (19) rumah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktari Wulandari pada tahun 2016 adalah dimana dalam penelitian ini keduanya sama-sama mengkaji tentang salah satu program yang ada di Kabupaten Bangka Barat yaitu Program Desa Mandiri yang merupakan salah satu program unggulan untuk menjadikan semua desa mandiri dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah dalam penelitian di atas lebih melihat bagaimana program desa mandiri di Desa Ketap dan juga Perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah Desa Ketap menjadi Desa Mandiri, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada bagaimana perbandingan sinergi perangkat Desa Sinar Sari yang dilihat dari keunggulan mereka yaitu dari potensi perkebunannya dengan Desa Tanjung Niur yang dilihat dari Potensi Kelautannya.

Sedangkan Penelitian *ketiga* adalah penelitian yang dilakukan oleh Nisma Salwa Hayati pada tahun 2015 yang berjudul “*Peran Elit Lokal Dalam Mengembangkan Usaha Bumdes Harapan Makmur Didesa*

Zed Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka” yaitu peran elit lokal yaitu elit formal dan informal dalam mengembangkan usaha BUMDes, (KKD, SPAM, dan Perkenunan Kelapa Sawit) Harapan Makmur Desa Zed Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka.

Peran tersebut antara lain : peran sebagai eksekutif, perencana, pembuat kebijakan, ahli, peran yang mewakili kelompok luar, pengontrol perilaku atau hubungan para anggotanya dan juga peran pengambil alih penanggung jawab telah berjalan. Secara umum, dari ketujuh peran ini ada yang sudah dilakukan dengan maksimal dan ada yang belum maksimal. Peran yang sudah dilakukan dengan maksimal ini yaitu peran sebagai eksekutif, perencana, pembuat kebijakan dan juga pengambil alih tanggung jawab.

Dari keempat peran yang sudah dilakukan ini sesuai dengan posisi mereka sebagai elit lokal untuk memberikan suatu kemajuan bagi usaha BUMDes ini kedepannya dan juga mampu memberikan suatu hasil yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya, namun, terdapat beberapa peran yang tidak dilaksanakan dengan baik atau kurang maksimal yaitu peran sebagai ahli, peran yang mewakili kelompok luar, dan juga peran sebagai pengontrol perilaku atau hubungan para anggotanya.

Walaupun peran yang dijalankan terdapat fungsi dan disfungsi, namun elit lokal formal dan informal tetap memberikan kontribusi dalam mengembangkan usaha BUMDes Harapan Makmur Desa Zed Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka.

Penelitian Nisma Salwa Hayati (2015) ini membicarakan tentang peran elit lokal yaitu elit formal dan elit informal dalam mengembangkan usaha BUMDesa. Dari beberapa peran yang sudah berhasil dilaksanakan namun ada beberapa juga yang belum dilaksanakan. persamaan penelitian Nisma Salwa Hayati (2015) dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran lembaga-lembaga desa dalam mewujudkan desa mereka sebagai desa yang mampu menjalankan program yang telah dibuat oleh kabupaten masing-masing. Pada Program ini, peran aparat pemerintahan desa sangat menentukan berhasil atau tidaknya program dari pemerintahan kabupaten.

Berbeda dengan penelitian ini yang ingin melihat sinergisitas lembaga desa secara nyata dalam mewujudkan desa menjadi desa mandiri dan mampu membuat kesejahteraan masyarakatnya menjadi lebih baik lagi dan tentunya peran masyarakat juga mempengaruhi hal tersebut.

F. Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Tokoh Robert K. Merton. Robert K. Merton menitik beratkan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam berperilaku. Menurut Robert K. Merton konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam berperilaku itu ada yang mengarah pada integrasi dan keseimbangan (fungsi *Manifest*), akan tetapi ada pula konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku itu yang

tidak dimaksudkan dan tidak diketahui yang justru akan memperoleh integrasi. Kenyataan yang tidak dimaksudkan dan tidak diketahui tersebut yaitu berupa konsekuensi yang bersifat disfungsional (Wagiyo, 2003 : 3.1).

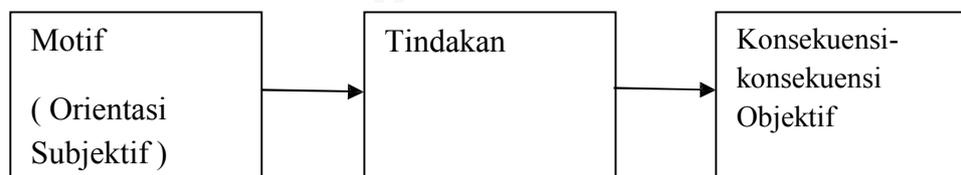
Selanjutnya dinyatakan oleh Robert K. Merton bahwa konsekuensi-konsekuensi objektif itu sangat penting artinya, karena dapat digunakan dalam rangka pengembangan Teori Fungsionalisme Struktural. Dalam hal ini konsekuensi-konsekuensi objektif yang bersifat disfungsional justru dapat menimbulkan adanya perubahan sosial. Hal ini karena dengan adanya konsekuensi-konsekuensi yang bersifat disfungsional menyebabkan adanya ketidakseimbangan dan pertentangan yang dapat menghadirkan pemikiran-pemikiran yang bersifat alternatif untuk menghilangkan ketidakseimbangan dan pertentangan yaitu yang berupa struktur substansi.

Menurut Turner (2012 : 181) Merton mengidentifikasi sejumlah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu analisis fungsional yang memadai. Syarat-syarat tertentu tersebut diantaranya adalah yang menjadi objek analisis fungsional hanyalah unit-unit sosial standar, harus membedakan akibat subjektif dan akibat objektif, yang sengaja dan tidak sengaja, harus dikaitkan dengan unit struktural tertentu dan pembahasan yang memuat tentang mekanisme-mekanisme melalui syarat-syarat tertentu.

Menurut sudut pandang Merton dalam Ritzer dan Goodman (2010 : 269) menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat dan kebudayaan. Ia menyatakan bahwa objek apa pun yang dapat dianalisis secara struktural fungsional harus “mempresentasikan unsur-unsur standar (yaitu, yang terpola dan berulang)”. Ia menyebut hal tersebut sebagai “peran sosial, pola-pola institusional, proses sosial, pola-pola kultural, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat kontrol sosial, dan lain sebagainya”.

Dalam suatu masyarakat struktural fungsional sangat diperlukan terutama dalam suatu lembaga atau organisasi. Dengan adanya struktural fungsional dapat mengontrol tindakan-tindakan dari anggota-anggota yang ada didalam suatu organisasi. Sehingga Peran yang harus ia kerjakan akan sesuai dengan posisi yang telah di tentukan dalam organisasi tersebut.

Adapun mengenai perbedaan antara orientasi subjektif (motif) dengan konsekuensi-konsekuensi objektif dapat ditunjukkan dalam skema berikut :



Berkenaan dengan hal tersebut diatas ia membedakan secara tajam antara fungsi *manifest* dengan fungsi *latent*, yaitu :

1. Fungsi *manifest* adalah berupa konsekuensi-konsekuensi objektif yang membantu pada penyelesaian terhadap sistem dan diketahui oleh para anggota dalam sistem. Fungsi *manifest* atau fungsi tampak, adalah konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat yang orang harapkan dari suatu tindakan sosial atau situasi sosial.
2. Fungsi *latent* adalah konsekuensi-konsekuensi objektif yang tidak dimasukkan dan tidak diketahui. Selanjutnya dijelaskan bahwa banyak tindakan fungsional (menguntungkan) pada suatu sistem, akan tetap banyak pula suatu tindakan yang disfungsional (tidak menguntungkan) bagi adaptasi terhadap suatu sistem.

Merton menjelaskan bahwa akibat yang tak diharapkan tak sama dengan fungsi yang tersembunyi. Fungsi tersembunyi adalah jenis dari akibat yang tak diharapkan, satu jenis yang fungsional untuk sistem tertentu (Ritzer dan Douglas, 2010 : 141).

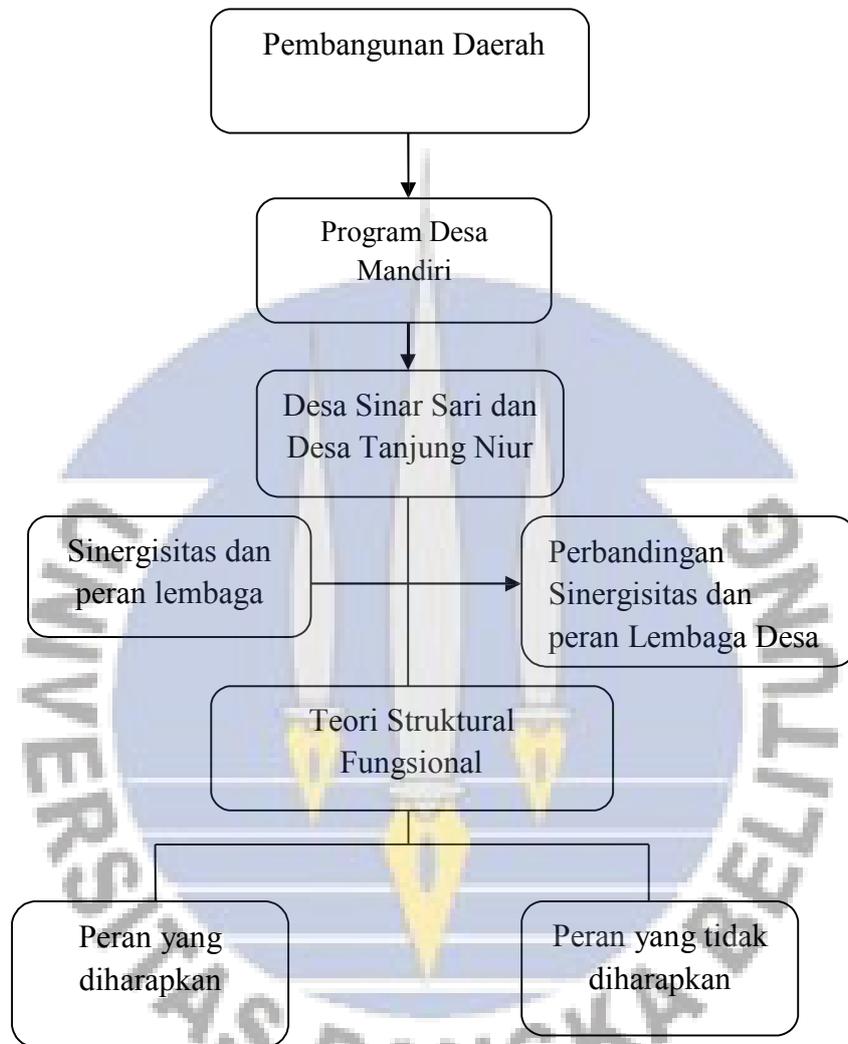
Adapun kaitan dengan teori Fungsionalisme Struktural Robert K. Merton mengenai fungsi *manifest* dan fungsi *latent* dengan penelitian yang dilakukan mengenai sinergisitas dan peran lembaga desa dalam mensukseskan program desa mandiri di Desa Sinar Sari dan Desa Tanjung Niur. Peneliti ingin melihat bagaimana fungsi lembaga desa selama ini dalam mewujudkan Desa Sinar Sari dan desa Tanjung Niur sehingga mendapatkan predikat sebagai Desa Mandiri.

Fungsi tampak dalam sinergisitas lembaga desa dapat dilihat bagaimana perangkat desa di kedua desa tersebut saling bekerjasama dalam

mewujudkan desa mereka sebagai desa mandiri. Sedangkan fungsi tak tampak dapat diukur dengan adanya kurangnya antusias atau penyelewengan yang dilakukan perangkat desa.



G. Skema Alaur Pikir



Gambar 1. Skema Alur Pikir Penelitian

Dari skema alur pikir diatas, tujuan dari adanya peneliian ini adalah melihat bagaimana program pembangunan daerah yang di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Manfaat yang mampu dirasakan sehingga pembangunan yang semulanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi maupun sosial pada umumnya dapat tercapai. Program desa mandiri ini, mengutamakan adanya partisipasi aktif dari *stekholder-stekholder* yang terlibat di dalamnya misalnya Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan tentunya masyarakat itu sendiri. Untuk penelitian ini sendiri dilakukan di dua tempat yaitu Desa Sinar Sari dan Desa Tanjung Niur, dimana kedua desa tersebut merupakan salah satu dari beberapa desa yang mendapatkan predikat sebagai desa mandiri.

Lebih jauh penelitian ini akan di arahkan kepada bagaimana sinergisitas dan peran terutama dari lembaga desa dan tim desa mandiri itu sendiri untuk menjalankan program percepatan pembangunan yakni program desa mandiri. Desa Sinar Sari dan Desa Tanjung Niur yang keduanya merupakan beberapa desa yang mendapat predikat sebagai desa mandiri memiliki perbedaan dalam menjalankan program tersebut, mengingat keduanya dari segi potensi yang diunggulkan berbeda, dimana Desa Sinar Sari dilihat dari potensi perkebunannya dan Desa Tanjung Niur potensinya adalah keluatan.

Adanya program desa mandiri ini cukup membawa dampak positif bagi desa yang mendapatkan predikat desa mandiri, namun ada juga dampak

negatif yang ditemukan dalam program tersebut seperti kurangnya antusias dan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh lembaga desa dan tim desa mandiri dalam menjalankan program tersebut. Untuk penggunaan teori yaitu Teori Fungsionalisme Struktural dari Robert K. Merton, yaitu berkaitan dengan adanya fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi *manifest* atau fungsi yang tampak disini dapat dilihat dari uapaya kerjasama lembaga desa dalam menjalankan program desa mandiri, sedangkan fungsi laten atau fungsi tidak tampak dimana adanya ketidak antusias dan kerja sama yang dilakukan oleh lembaga desa sehingga program tersebut tidak berjalan sebagaimana tujuan yang diharapkan atau tujuan utamanya yakni desa menjadi sejahtera baik itu secara ekonomi maupun sosial yang dilihat dari potensi masing-masing desa.

